

Warning Reshuffle Kabinet

Sejak diunggahnya video arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020, isu reshuffle kabinet semakin kencang. Dalam video itu, Jokowi jelas melontarkan ancaman reshuffle kepada para menteri dan kepala lembaga. Apakah ini hanya geretakan saja atau memang akan segera dilakukan pergantian menteri di masa kerja kurang dari setahun? Berikut perbincangan wartawan *Suara Merdeka* Hanung Soekendro dengan dosen di Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Drs Yuwanto MSi PhD.

Presiden telah mengutarakan kalimat reshuffle, bagaimana Anda memaknainya?

Ancaman reshuffle Presiden Jokowi di sidang kabinet harus dilihat dalam konteks yang lebih besar. Yaitu konteks dimana menurut Presiden Jokowi, kinerja para menteri hanya standar saja. Biasa-biasa saja. Hal yang juga dievaluasi oleh presiden adalah sikap dan perilaku kebijakan para menteri cenderung tidak didasari oleh orientasi situasi krisis yang sekarang dihadapi.

Namun sesungguhnya pernyataan atau ancaman reshuffle itu juga memiliki visi simbolik. Yaitu menegaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif penuh untuk mengganti pembantunya setiap saat. Disamping itu, Jokowi sedang mengirimkan sinyal kepada parpol yang menempatkan elit mereka di kabinet pemerintahan untuk juga membantu meningkatkan kinerja.

Jika kinerja menteri biasa-biasa saja, artinya target pemerintah meleset?

Jadi dari statemen yang langsung disampaikan oleh Presiden, sesungguhnya secara internal ada pengakuan bahwa capaian kinerja pemerintahan saat ini belum secara optimal bisa memenuhi ekspektasi atau harapan publik. Terutama di tengah dilema antara pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 dan merosotnya aktivitas maupun produktivitas perekonomian nasional secara riil.

Itu komentar yang sifatnya hanya menafsir ulang hal-hal yang secara tersurat atau eksplisit disampaikan presiden.

Reshuffle itu hanya sebatas ancaman atau memang akan segera dilakukan?

Saya melihat masih sebatas warning. Sebagai peringatan bahwa kalau sikap dan perilaku kebijakan para pengambil keputusan ini tidak didasari oleh pola pikir manajemen krisis dan keberanian mengambil kebijakan dramatis untuk atasi krisis, ya presiden tak segan mengganti mereka.

Tapi sekali lagi itu kan tafsiran atas statemen. Kita bisa membaca rangkaian kalimat statemen itu. Bahwa ini bagian upaya menaikkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi yang saya kira juga dari sisi persepsi atau popularitas Jokowi berangsur merosot. Itu bagian

dari komunikasi politik dalam rangka yakinkan publik bahwa presiden itu sudah sedemikian maksimal untuk menjalankan fungsi dan peran situasi krisis.

Seandainya memang akan dilakukan reshuffle, kapan waktu yang tepat? Melihat saat ini kinerja para pembantu presiden masih kurang dari setahun.

Jika ditanya kapan? Bisa dilihat dari capaian kinerja para menteri. Kan bisa diukur secara kualitatif dan kuantitatif.

Misalnya ada PHK semakin bertambah banyak. Bisa diukur dalam situasi saat ini ada skema solusi kebijakan seperti apa.

Adaptasi menteri itu tak sepenuhnya harus diukur dengan durasi waktu tertentu. Tidak harus menunggu ganti tahun. Sesungguhnya potensi kinerja maupun kompetensi seorang menteri bisa dilihat tanpa batasan durasi itu.

Mengapa saya katakan begitu, karena posisi menteri itu sesungguhnya jabatan politis, bukan teknis. Karena berada pada level para pembuat kebijakan. Misi mereka itu juga bisa dilihat dari kualitas kebijakan yang dibuat atau bahkan masih dalam perancangan sekalipun. Menurut saya, jika saat ini diganti maka tak akan ada goncangan.

Menteri apa yang direshuffle?

Saya tak mau menebak. Saya hanya menduga bahwa tentu menteri yang secara langsung terkait dengan berhasil atau tidak berhasilnya pemerintah mengatasi dua isu. Yaitu isu kesehatan soal pandemi Covid-19 dan isu perekonomian nasional. Jadi tentu dua bidang itu. Ekonomi bukan hanya ekonomi makro tapi juga mikro. Artinya perekonomian riil sehari-hari yang terkait langsung dengan aktivitas masyarakat.

Soal kesehatan, maksudnya kinerja Menkes tak optimal?

Di ranah publik, keberadaannya sudah terwakili oleh Doni Monardo (Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19) dan Jubir Gugus Tugas

Penanganan Covid-19. Tapi saya lihat, Kemenkes belum ada kebijakan yang drastis atau dramatis untuk bisa menaikkan peran kementerian kesehatan itu sebagai pengatur dan sekaligus fasilitator dari kebijakan makro di bidang kesehatan.

Ramai disebut menteri yang direshuffle adalah menteri dengan latar belakang parpol. Apakah nantinya lebih baik penggantinya dari profesional?

Pola pengisian anggota kabinet saat ini, presiden tak bisa abaikan formasi dan kuantitas menteri yang diambil dari parpol. Pendekatan itu masih akan ditempuh oleh presiden. Apalagi jabatan presiden masih cukup lama. Menteri dari parpol menjadi cerminan presidensial. Menteri dari parpol lagi. Saya yakin, saat ini banyak orang yang punya kompetensi.

Statemen reshuffle dari Presiden Joko Widodo juga sinyal kepada parpol yang menempatkan elit mereka dalam kabinet pemerintahan untuk juga membantu meningkatkan kinerja.

Karena parpol yang menempatkan elitnya di legislatif, yakni pengusung parpol pengusung Presiden Jokowi. Akhir-akhir ini parpol pengusung seperti berbalik arah menyerang pemerintahan.

Ada beberapa contoh atau statemen keras yang dilontarkan para anggota DPR. Mislanya, pernyataan yang sebenarnya bukan komentar konstruktif dan menimbulkan perdebatan yang tidak perlu.(21)

Drs Yuwanto MSi PhD

Pendidikan Lahir : Klaten, 25 Maret 1965

- S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro
- S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia
- S3 Ilmu Politik Sogang University, Seoul-KORSEL

Pekerjaan

- Dosen di Departemen Politik & Ilmu Pemerintahan FISIP Undip (1988-sekarang)
- Dosen di Prodi S-2 dan S-3 di Lingkungan FISIP Undip (2009-sekarang)
- Dosen di Akademi Kepolisian Semarang (2010-sekarang)
- Kepala P2KKN LPM Undip (1997-2001)
- Staf Ahli Rektor Undip (2010-2014)
- PD IV FISIP Undip Bidang Pengembangan dan Kerjasama (2011-2015)
- Ketua Program Doktor Ilmu Sosial (DIS) FISIP-Undip (2017-sekarang)
- Tenaga Ahli (TA) DPRD Provinsi Jawa Tengah (2016 - 2019)

